

PNI Dalam Pemilu 1955 di Jakarta

Ajeng Kusumaning Ayu¹⁾
Muryadi²⁾

Abstrak

Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia. Pada pemilihan umum ini, PNI keluar sebagai pemenang urutan pertama. Keberhasilan PNI dalam mendulang suara terbanyak dapat dikatakan tidak terlalu mengejutkan karena partai ini memiliki kedekatan politik serta ideologi dengan Presiden Soekarno. PNI sebagai partai politik jelas memiliki kompetitor yang berbeda di masing-masing kawasan di Jakarta. Persaingan dalam merebut suara rakyat di Jakarta antara PNI sebagai salah satu partai yang dominan berhadapan dengan Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga partai Nahdlatul Ulama menarik untuk dilihat sebagai acuan distribusi kekuatan politik di Jakarta, maka hasil perolehan Pemilu 1955 di Jakarta, PNI sebagai partai politik tidak mengalami kemenangan yang signifikan dan kalah dari Masyumi.

Kata Kunci : PNI, Pemilu 1955, Jakarta

Abstract

Election 1955 is an election was held for the first time in Indonesia. In election 1955, PNI came out as the winner of the first order. The success of PNI did earn the most votes nationwide is not too surprising because this parties have political and ideological proximity with President Soekarno. PNI as a political parties clearly have different competitors in each district in Jakarta. Competition in seizing the voice of the people in Jakarta between PNI as one of the dominant parties dealing with Masjumi, the Indonesian Communist Party (PKI), until Nahdlatul Ulama interesting to be seen as a reference for the distribution of political power in Jakarta, then the result of the acquisition of the 1955 elections in Jakarta, PNI as political parties did not experiences as a significant victory, PNI outvoted of Masjumi.

Keywords: PNI, Election 1955, Jakarta

Pendahuluan

Pemilu merupakan proses yang penting dalam mengukur kekuatan partai politik yang menghasilkan lembaga perwakilan yang bermutu, selain itu agar sistem pemerintahan di suatu negara berjalan secara demokratis. Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk

membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan (Feith, 1999:4-5). Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu mutlak untuk dilakukan oleh negara Indonesia pasca kemerdekaan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955.

1) Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya (NIM: 121114067. Email: ajengkusuma91@gmail.com)

2) Dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya (NIP: 196402181994031002)

Pemilihan Umum 1955 merupakan salah satu program dari Kabinet Parlementer RI di bawah pemerintahan Presiden Soekarno yang diselenggarakan selama dua kali pemungutan suara, untuk pemilihan parlemen yang diadakan pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan konstituante yang diadakan pada tanggal 15 Desember 1955 (*Sin Po*, 18 April 1955). Hal tersebut kemudian mendorong berbagai partai yang sudah ada di Indonesia bersaing untuk meningkatkan kampanyenya demi memperoleh suara dan simpati dari masyarakat.

Hasil pemungutan suara 1955, menempatkan 4 partai besar pemenang Pemilu, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), serta Partai Komunis Indonesia (PKI) (M. Rusli Karim, 1983:53). Pada Pemilihan Umum ini, PNI keluar sebagai pemenang urutan pertama, dengan perolehan suara 8.434.635 untuk parlemen serta 9.070.218 untuk pemilihan konstituante. Keberhasilan PNI dalam mendulang suara terbanyak secara nasional dalam Pemilu 1955 ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Hal ini dikarenakan PNI merupakan salah satu partai besar yang memiliki kedekatan politik serta ideologi dengan Presiden Soekarno (Nazaruddin Sjamsuddin, 1984:10-11). Namun demikian, menarik untuk mencermati pemetaan politik yang dilakukan PNI di setiap daerah pemilihan dalam Pemilu 1955. Salah satunya adalah melihat PNI dalam kemenangan Pemilu 1955 di Jakarta, sebagai wilayah yang berdekatan dengan pusat kekuasaan dalam hal ini pemerintahan, dimana segala aktivitas politik, sosial, dan ekonomi lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan di luar Jakarta memperlihatkan konstalasi politik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

PNI sebagai partai politik jelas memiliki kompetitor yang berbeda di masing-masing kawasan di Jakarta. Persaingan dalam merebut suara rakyat di Jakarta antara PNI sebagai salah satu

partai yang dominan berhadapan dengan Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga Partai Nahdlatul Ulama menarik untuk dilihat sebagai acuan distribusi kekuatan politik di Jakarta, maka hasil perolehan Pemilu 1955 di Jakarta, PNI sebagai partai politik tidak mengalami kemenangan yang signifikan dan kalah suara dari Masyumi, selain itu, melalui hasil Pemilu 1955 ini, dapat memperlihatkan peta politik, perilaku pemilih, partisipasi politik masyarakat di Jakarta hingga bagaimana strategi kemenangan yang dilakukan oleh PNI dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu 1955 di Jakarta secara mendalam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Sumber-sumber yang digunakan berupa arsip, koran, majalah, buku, dan dokumen-dokumen, seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi PNI, serta wawancara.

Sejarah Singkat PNI Sampai Tahun 1955

Pada hari Senin tanggal 4 Juli 1927, berdirilah Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung, yang kemudian dalam Kongresnya yang pertama di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928 diganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Para pendiri partai tersebut terdiri dari 8 orang yaitu Ir. Soekarno, dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Ishak, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, dan dr. Samsi (Soenario, 1972:3-4). Oleh karena PNI dianggap sebagai organisasi yang dapat mengganggu stabilitas negara, maka pemerintah kolonial Belanda melarangnya. Pada tanggal 25 April 1931 kemudian partai ini dibubarkan dengan persetujuan Pengurus Pusat dan Daerah.

Perkembangan PNI ini dapat dilihat kembali pasca kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu Presiden Soekarno memberikan pidato yang berisi

anjuran untuk pembentukan Partai Nasional Indonesia. Prakarsa Presiden Soekarno untuk mendirikan PNI sebagai satu-satunya partai yang anggotanya mencakup semua aliran politik di dalam masyarakat yang baru merdeka tersebut hanya sebuah propaganda saja (Ali Sastroamijoyo, 1974:143). Babak selanjutnya, nasib PNI sebagai partai tunggal menjadi berantakan ketika pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan sebuah Maklumat, hasil desakan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) untuk mendirikan sebanyak-banyaknya partai politik demi terselenggaranya iklim negara yang demokratis. Maka, sejak tanggal 3 November 1945 berdirilah partai-partai politik, seperti Partai Sosialis sebagai peleburan golongan Sosialis Syahrir dan golongan Sosialis Amir Syarifuddin, yakni Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia, serta partai dari kaum nasionalis yaitu Serikat Rakyat Indonesia atau Serindo. Serindo merupakan partai yang menjalin hubungan dengan pimpinan-pimpinan organisasi golongan nasionalis diberbagai daerah di tanah air. Pada perkembangan disetujui untuk mengadakan fusi antara Serindo dengan seluruh organisasi yang berfaham nasionalis lainnya, yang akhirnya dibentuk organisasi baru dengan nama Partai Nasional Indonesia dengan Sarmidi Mangunsarkoro sebagai ketuanya (Soenario, 1972:48-51).

Melihat sejarah singkat PNI di atas, menjelaskan dinamika perkembangan PNI dalam setiap periode mengalami perbedaan serta pasang surut. Perbedaan pada tahap pembentukan PNI tahun 1927 antara lain oleh Soekarno, bahwa PNI merupakan salah satu partai yang pada masa tersebut dibentuk dalam situasi penjajahan pemerintah kolonialisme Belanda. Hal tersebut mempengaruhi ideologi pendiri yang bertujuan partai untuk mencapai kemerdekaan. Azas yang dipakai adalah nasionalisme dan demokrasi, dari azas ini

PNI mengharapkan agar masyarakat Indonesia yang dijajah oleh Belanda menjadi satu bangsa yakni Indonesia. Sedangkan azas demokrasi PNI mengharapkan terwujudnya persamaan bagi semua orang di dalam masyarakat dan adanya kekuasaan rakyat di dalam negara (Suhartono, 1994:56). Sementara PNI yang didirikan pasca kemerdekaan Indonesia menginginkan suatu bentuk partai yang dapat mengisi kemerdekaan, dengan pembangunan di segala sektor seperti pertahanan, perekonomian, sosial, dan politik yang tercantum sesuai UUD 1945. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Soekarno ingin merangkul seluruh elemen masyarakat serta tentunya seluruh elemen golongan aliran politik yang ada bergabung ke dalam satu wadah, yakni partai tunggal PNI (Cahyo Budi Utomo, 1995:42). Di sisi lain, PNI yang dibentuk pasca dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, yang pada mulanya bernama Serindo merupakan suatu partai kelanjutan yang masih memegang teguh nilai dasar perjuangan PNI tahun 1927. Namun babak baru bagi perkembangan PNI untuk memantapkan posisinya dalam pemerintahan serta mempersiapkan seluruh kadernya dalam menduduki parlemen atau kabinet di mulai dari tahun 1950-1955. Dapat dikatakan demikian, karena sebagai salah satu partai yang kuat serta kader-kadernya berpengalaman dalam pemerintahan PNI juga harus mengamankan posisi Soekarno untuk tetap menjadi Presiden di Indonesia. Sehingga jelas gambaran yang harus dilakukan PNI dalam mempersiapkan mesin partainya dalam menghadapi Pemilu 1955, dimana terdapat 3 kekuatan partai yang juga kuat yakni Masyumi, PKI, dan Nahdlatul Ulama.

PNI Jakarta Menghadapi Pemilu 1955

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo yang pertama berlangsung terjadi kampanye pemilihan umum pertama oleh partai-partai politik, termasuk Partai Nasional Indonesia.

Persiapan yang dilakukan oleh kabinet dalam hal ini adalah memberikan penerangan mengenai pemilu kepada rakyat di seluruh Indonesia. Penerangan ini sekaligus merupakan pendidikan kepada rakyat karena sebelumnya Republik Indonesia belum pernah menyelenggarakan pemilu.

Dalam hal pengumpulan dana untuk kegiatan partai, pimpinan Partai Nasional Indonesia menetapkan bahwa semua anggota partai yang duduk dalam pemerintahan seperti di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Kabinet, di haruskan memberi sumbangan kepada PNI. Oleh karena itu, ketika menghadapi Pemilihan Umum, karena tidak ada bantuan dari pemerintah maka dana di tanggung bersama secara gotong-royong oleh anggota PNI sendiri, seperti dalam pembuatan panggung kampanye, poster, bendera, dan spanduk yang dilakukan secara sukarela dan sebagai sikap loyalitas yang kuat anggota partai terhadap partainya (Soenario, 1972:3).

PNI memang jeli dalam memainkan peran politik ke dalam masyarakat, yakni dengan memanfaatkan kesenian tradisional Betawi, seperti kesenian *Lenong*, *Ondel-Ondel* dan pertunjukkan pencak silat Betawi guna mensosialisasikan partainya kepada masyarakat Jakarta. Tujuannya jelas yakni untuk mengawal suara masyarakat Jakarta di kalangan bawah dan berada di wilayah pinggiran untuk dapat andil memilih PNI dalam Pemilu 1955. Melalui kesenian yang merakyat serta gaya Ali Sastroamijoyo yang turun *blusukan* ke masyarakat kelas bawah, PNI di Jakarta dapat mudah dikenal serta dapat engan mudah pula menancapkan hegemoni-hegemoni di masyarakat bawah mengenai program kerja yang akan ditawarkan oleh PNI. Hal ini dilakukan oleh PNI karena melihat kekuatan Masyumi di Jakarta juga kuat dan mempunyai suara utuh dari golongan Islam, abangan, hingga birokrat. Oleh karena mengandalkan figur atau

ketokohan dari Soekarno sebagai PNI tidak cukup, karena mayoritas masyarakat Jakarta dalam bidang pendidikan sudah mengerti politik dan politik aliran atau ideologis, sehingga pada tahun 1955 PNI di Jakarta tidak mudah untuk memperoleh suara dari masyarakat (Wawancara dengan Hardi, 3 Mei 2015).

Selain ciri khas kesenian, kampanye PNI juga memanfaatkan jalur birokrasi dengan memanfaatkan tokoh-tokoh birokrat di pinggiran wilayah Jakarta, seperti lurah, kepala desa, hingga camat. Sebagai juru kampanye PNI, aparat desa ini sering mensosialisasikan program-program yang diusung oleh PNI sebagai partai front nasional di masyarakat (Freith, 1962:432). Cara kampanye seperti ini dirasa sangat efektif, karena masyarakat pinggiran Jakarta menganggap PNI merupakan partai yang memiliki simpatisan atau kader yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi/terpelajar dan sosok kharismatik dari Soekarno, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan untuk memilih PNI. Hal tersebut membuat jumlah anggota PNI di Jakarta dalam menghadapi Pemilu 1955 menjadi meningkat (*Suara Masyarakat*, 24 Agustus 1955).

Selain itu, kampanye yang dilakukan oleh PNI adalah dengan marhaenisme (*Suluh Indonesia*, 4 Juli 1955). Marhaenisme merupakan ideologi yang menekankan pada aspek kemandirian dalam berbagai aspek dan merupakan sebuah paham perlawanan yang terbentuk dari sosio-demokrasi dan sosio-ekonomi Bung Karno. Selain, mengangkat tentang Marhaenisme, PNI juga mengkampanyekan bahwa PNI memiliki kedekatan secara kultural dengan Soekarno sebagai pencetus paham Marhaenisme. Dalam salah satu media cetak bahkan terdapat iklan yang berjudul “Bung Karno Udah Pasti Tusuk Tanda Gambar PNI” (*Suara Masyarakat*, 4 Oktober 1955) dan “Menusuk kepala dalam segitiga, berarti menuju masyarakat sama rata sama bahagia (*Suluh Indonesia*,

27 September 1955). Hal ini merupakan sebuah cara yang efektif untuk menjangkau suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jakarta yang sebagian masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman dan cenderung lebih bersifat konformis dan agraris. Selain itu dijelaskan juga dalam kampanye bahwa PNI adalah partai yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme, anti penjajahan, menggalakan negara persatuan anti terhadap kemiskinan dan menyusun program ekonomi yang tegas. Dengan demikian, hal-hal di atas diharapkan dapat menjadi faktor penentu kemenangan PNI di Jakarta.

Persaingan PNI dalam Pemilu 1955: Perang Kampanye Partai

Kehidupan partai politik menjelang diselenggarakan pemilu banyak diwarnai oleh pertentangan politik, terutama oleh partai-partai besar. Partai politik berupaya mencari dukungan massa dengan menyelenggarakan kampanye. Metode dan teknik kampanye yang digunakan oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sangat beragam. Pemutaran film, perayaan hari besar agama, perayaan ulang tahun atau pawai, serta banyak bermunculan tanda-tanda gambar partai di berbagai tempat. Langkah yang dilakukan oleh seluruh partai besar ini sebagai upaya untuk menambah jumlah anggota partai dan memperoleh suara yang signifikan dalam Pemilu 1955.

Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar peserta Pemilu untuk mensosialisasikan program partainya adalah dengan membuat surat kabar sebagai alat agitasi dan propaganda, hingga menyebar selebaran kertas berupa tanda gambar yang ditempel atau dibagikan di tempat umum (Feith, 1999: 31). Selain itu, model kampanye yang dilakukan semua partai peserta Pemilu menjelang berlangsungnya pesta akbar demokrasi ini adalah dengan

menyelenggarakan rapat dengan pidato atau orasi yang biasanya dilakukan oleh pemimpin partai, juru kampanye, hingga tokoh-tokoh partai yang mempunyai ketokohan di masyarakat. Jalannya kampanye berjalan seru, terkadang mereka saling menyela dengan nada yang sangat tajam, kritik atau mencaci salah satu partai sudah menjadi bumbu dalam aroma persaingan merebut suara masyarakat. Mereka tak peduli apakah hal-hal tersebut ditujukan kepada seseorang yang sedang menjabat menteri, anggota parlemen, atau orang biasa (G. Moedjiyanto, 1988).

Pada bulan April 1953, Undang-Undang tentang Pemilu disahkan. Untuk pertama kalinya, para politisi di Jakarta mulai bekerja membangun dukungan massa yang akan memberikan dukungan suara. Dalam usaha mencari dukungan rakyat itu, mereka menggunakan banyak daya tarik ideologis yang meningkatkan ketegangan masyarakat. Selama lebih dari dua tahun kekacauan politik dan kekerasan meningkat dan diharapkan oleh banyak orang bahwa pemulihan-pemulihan tersebut akan menghasilkan suatu struktur politik yang kokoh untuk massa mendatang (M.C. Ricklefs, 2008: 488). PNI, Masyumi, NU, dan PKI itu rival dan bersaing ketat, sehingga tidak jarang terjadi berbagai gesekan antara keempat partai tersebut. PNI terang-terangan menolak Darul Islam. Begitu pula antara Masyumi dan NU dengan nasionalis atau komunis. Semuanya diungkapkan secara gamblang dan jelas termasuk dalam rapat akbar untuk menggaet pemilih (Wawancara dengan Aziz, 8 Maret 2015). Pertarungan wacana yang tajam terjadi terutama antara PNI-Masyumi, PKI-Masyumi, PNI-PKI. Sementara itu, antara partai-partai Islam pertarungan wacana tidak terlalu tajam karena di antara partai-partai Islam dilakukan kesepakatan untuk menjaga ukhuwah islamiyyah.

Perang wacana yang paling panas adalah antara PNI dan Masyumi.

Pertarungan antara dua kekuatan terkuat ini makin memanas ketika terjadi perubahan dari kabinet Ali Sastroamidjojo yang berasal dari PNI ke Burhanudin Harahap dari Masyumi, dimana tidak satupun orang PNI dimasukan ke dalam kabinet. Saling serang dan bertahan dilakukan oleh kedua partai tersebut. PNI selalu melakukan upaya penyerangan terhadap kinerja kabinet Burhanudin Harahap. Selain itu, dalam *Suluh Indonesia* disebutkan bahwa Masyumi mempropagandakan bahwa pemerintah, pemerintah dari pamong desa dari PNI tidak usah ditaati karena orang yang berkuasa adalah orang Masyumi (*Suluh Indonesia*, 7 September 1955). Selain itu ada pula wacana tentang pencatutan Bung Karno oleh orang-orang Masyumi. Hal yang paling sering diangkat dalam wacana-wacana tentang Masyumi akan mengubah ideologi Indonesia menjadi negara Islam.

Strategi PNI Jakarta dalam Menghadapi Pemilu 1955

Pada tanggal 4 April 1953, disahkan Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Umum. Dengan demikian, partai-partai menggangap hari itu sebagai di mulainya masa pengenalan atau kampanye terhadap calon pemilih. Pada tanggal 31 Mei 1954, pemerintah melalui panitia pemilihan pusat mengesahkan lambang-lambang partai. Hal ini berarti kampanye mulai berjalan secara lebih luas dengan pengenalan lambang partai sebagai tanda dalam pemilihan umum. Partai-partai mulai menyusun strategi dalam pemenangan pemilihan umum.

Penyusun strategi dalam pemenangan pemilihan umum dilakukan oleh PNI dalam situasi yang sangat menguntungkan. Hal ini terjadi karena sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yakni dari bulan Juli 1953 sampai Juli 1955, dapat dikatakan PNI adalah partai penguasa. Hal ini karena pada masa itu kabinet dipegang oleh Ali Sastroamidjojo

sebagai seorang kader PNI. Beberapa posisi dalam kabinet dan pemerintahan juga dipegang oleh PNI, yakni menteri Luar Negeri (Mr. Sunario), Menteri Keuangan (Dr. Ong Eng Die), dan Menteri Perekonomian (Mr. Iskaq Tjokrodisurjo). Selain itu, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) juga diketuai oleh S. Hadikusumo seorang kader PNI. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kepercayaan dan *image* di kalangan masyarakat bahwa PNI adalah sosok yang memimpin negara. Hal ini kemudian berakibat pada mudahnya PNI dalam mencari dana kampanye, khususnya dari kalangan pengusaha, terutama pengusaha pribumi dan keturunan Cina (Feith, 1962:338-339).

Gambar benteng pada gambar partai juga menjadi salah satu alat yang di gunakan untuk menjaring suara pemilih. Dalam kampanye PNI, lambang benteng oleh para juru kampanye disebutkan sebagai lambang nasionalisme (Feith, 1955: 57). Walaupun sabar dan pelan, tetapi memiliki potensi yang besar untuk di gerakkan. Melihat basis masyarakat Jakarta yang sebagian hidup di perkampungan, program dari PNI ini merupakan campuran dari rekomendasi-rekomendasi untuk membantu buruh, menolong petani, mendorong pembangunan ekonomi, menasionalisasi industri-industri penting, mengorganisasi para pemuda dan berusaha menekankan pengaruhnya di segala lini.

PNI memiliki pandangan utama yakni Marhaen atau Nasionalisme Proletar. Basis utamanya ialah di dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor. Hal ini merupakan hal yang menguntungkan karena basis yang berasal dari kalangan pegawai atau priyayi akan sangat memberi pengaruh atau dukungan terhadap masyarakat pedesaan yang masih sangat menjunjung tinggi patron di kalangan masyarakat. Strategi lain adalah penekanannya pada pemikiran Soekarno yang sangat populis pada Marhaenisme. Hal ini menjadi daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim abangan,

karena partai ini dianggap sebagai partai Soekarno. Aspek “Soekarno” merupakan strategi yang juga digunakan dalam berbagai kegiatan kampanye PNI. Hal ini menyebabkan masyarakat pinggiran yang begitu mengidolakan Soekarno tertarik untuk memilih PNI, karena menurut propagandis PNI, Soekarno merupakan bagian dari PNI. Wacana tentang Bung Karno sebagai Kader PNI merupakan sebuah wacana yang sangat penting dan efektif untuk menjaring suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jakarta. Hal ini juga yang dimungkinkan menjadi faktor penentu kemenangan PNI yang sangat signifikan di Jakarta (Wawancara dengan Hardi, 3 Mei 2015). Soekarno menjadi daya tarik bagi pemilih dari kalangan masyarakat karena mereka percaya Soekarno sebagai sosok ratu adil.

Terkait dengan upaya melemahkan partai lain, PNI juga melakukan strategi melemahkan partai lawan, seperti Masyumi dengan berusaha mengaitkankan Masyumi dengan Darul Islam dan mengubah Pancasila lebih sebagai slogan anti Islam daripada falsafah pengayoman seperti yang dikehendaki Soekarno. Di samping itu, Masyumi juga mempropagandakan bahwa pemerintah-perintah dari pamong desa dari PNI tidak usah ditaati karena orang yang berkuasa adalah orang Masyumi (*Suluh Indonesia*, 7 September 1955). Selain itu ada juga wacana tentang pencatutan Bung Karno oleh orang-orang Masyumi. Hal yang paling sering diangkat dalam wacana-wacana untuk menyerang masyumi adalah wacana tentang Masyumi akan mengubah Ideologi Indonesia menjadi negara Islam (Wawancara dengan Hardi, 3 Mei 2015).

Salah satu doktrin yang dimiliki PNI adalah tentang doktrin OMDIS. OMDIS merupakan singkatan dari organisasi, militansi, disiplin, intropeksi, dan setia kawan. Penataan terhadap organisasi menjadi salah satu hal yang paling penting terhadap kemenangan PNI dalam pemilihan umum 1955. Tentang organisasi yang ada dalam tubuh PNI,

telah tersusun secara rapi pembagian wewenang dalam partai (Anggaran Dasar Partai Nasional Indonesia 1955). Dalam hal ini sengaja digunakan nama-nama dari dewan pimpinan Ormas PNI seperti yang digunakan oleh PNI sendiri dengan maksud untuk memudahkan pengertian, meskipun kita tahu bahwa tidak semua Ormas PNI menggunakan nama tersebut. Meskipun pimpinan partai itu merupakan suatu dewan (kolektif), namun masih juga sangat dirasakan perlunya diadakan pembagian tugas, berhubung sangat luas tugas pimpinan partai tersebut. Untuk itulah didalam suatu dewan pimpinan partai itu kita lihat adanya departemen-departemen, yang salah satunya departemen organisasi. Adapun kedudukan departemen-departemen dalam tubuh PNI termasuk departemen organisasi adalah merupakan staf/pembantu/aparat dari dewan pimpinan partai, hingga tidak dapat disejajarkan atau dipararelkan dengan departemen dalam pemerintahan (kabinet). Organisasi PNI merupakan tata organisasi yang modern dan terstruktur. Hal ini sangat memudahkan PNI dalam melakukan koordinasi dan manajemen wacana dalam kemenangan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Pemilihan umum 1955 ini sangat menarik karena tingginya kesadaran berkompetensi secara sehat, misalnya meski menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilihan umum dengan segala cara. Karena pemilihan umum kali ini dilakukan dengan dua keperluan yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante, maka hasil pun dipaparkan semuanya. Kemenangan mutlak yang diraih oleh PNI dan Masyumi

secara nasional menjadi salah satu alasan sumbangan suara yang sangat mutlak terhadap suara nasional.

Bagi PNI, kemenangan yang gemilang pada pemilu 1955 ini merupakan salah satu keberhasilan yang menjadi titik puncak kesuksesan strategi yang dimiliki oleh aktivis segenap partai ini. Hasil pemilihan anggota dewan konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota dalam pemilihan anggota DPR (Wawancara dengan Aziz, 8 Maret 2015).

Hasil Pemilihan Umum di Jakarta Tahun 1955

Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, tepatnya tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (*Prisma*, 9 September 1981). Pemilihan Umum 1955 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara UUD Pemilihan Umum no.7 tahun 1953). Pemilihan Umum yang dilaksanakan pertama kali, semenjak Indonesia merdeka ini, dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena diselenggarakan secara umum, langsung, bebas, dan rahasia. UU No. 7 tahun 1953 ini tidak membedakan gender, etnis, status sosial dalam hak pilih dan tidak membatasi hanya partai yang boleh menjadi kontestan pemilu.

Pelaksanaan Pemilu pertama ini di bagi atas 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 3.139 kecamatan, dan 43.429 desa (Alfian, 1991:6). Hasil pemilihan umum akan diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956 di Gedung Olahraga Jakarta dengan menampilkan Partai

Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia, sebagai empat besar partai terkuat. Rinciannya dapat diperoleh hasil, PNI dan Masyumi mendapat 57 kursi, Nahdlatul Ulama mendapat 45 kursi, sedangkan PKI memperoleh 39 kursi (*Antara*, 2 Maret 1956). Memang secara nasional perolehan suara PNI dapat mengungguli Masyumi, NU, dan PKI, namun yang menarik adalah hasil pemilihan umum di Jakarta, PNI bisa dikatakan mengalami kekalahan suara dengan Masyumi.

Daerah pemilihan Jakarta Raya di bagi menjadi dalam Pemilu 1955 di Jakarta, wilayah ini terbagi 21 kecamatan yang terdiri dari Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Kebon Jeruk, Matraman, Tanah Abang, Petamburan, Gambir, Pulo Seribu, Cengkareng, Mangga Dua, Sawah Besar, Tanjung Priok, Penjaringan, Krukut, Senen, Salemba, Pulo Gadung, Kampung Melayu, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pasar Rebo. Daerah pemilihan Jakarta Raya ini terdiri dari 1387 TPS. Dari 21 daerah pemilihan di Jakarta Raya, Masyumi mendominasi serta memperoleh perolehan suara terbanyak di 10 wilayah kecamatan, yakni Pasar Rabu, Pasar Minggu, Kampung Melayu, Pulo Gadung, Krukut, Penjaringan, Cengkareng, Tanah Abang, Kebon Jeruk, dan Kebayoran Lama. Sedangkan PNI hanya menguasai 8 kecamatan yakni, Salemba, Senen, Sawah Besar, Mangga Dua, Petamburan, Gambir, Matraman dan Kebayoran Baru. Untuk Partai Nahdlatul Ulama menguasai 2 kecamatan yakni Mampang Prapatan dan Pulo Seribu, dan PKI hanya memenangkan suara terbanyak di wilayah Tanjung Priok. Untuk hasil resmi pemilihan umum di Jakarta Raya menempatkan Masyumi menjadi urutan pertama dengan 200.478 suara, disusul PNI dengan 151.733 suara, kemudian NU dengan 120.696 suara, PKI 96.351 suara, PSI 34.952 suara, serta PSII 23.249 suara, partai-partai lainnya mendapat kurang lebih 500 suara.

Sedangkan untuk hasil pemilihan umum konstituante daerah pemilihan Jakarta Raya yang terdiri 200 TPS, tidak termasuk Pasar Minggu, dan Pulau Seribu, yang menduduki kedudukan paling tinggi adalah PNI 50.853 suara, Masyumi 31.428, NU 24.804, dan PKI 23.004. Diantara 21 kecamatan yang ada di kota Jakarta, dari 10 kecamatan Masyumi mencapai kemenangan 5 kecamatan, PNI di 2 kecamatan, NU di 2 kecamatan, dan PKI 1 kecamatan. Masyumi menang di kecamatan Kebayoran Lama, Cengkareng, Krukut, Kebon Jeruk, dan Tanah Abang, PNI menang di kecamatan Kebayoran baru, dan Sawah besar, NU menang di kecamatan Pulo Gadung, PKI menang di Tanjung Priok. Dengan hasil di atas maka kecuali di dua kecamatan yang belum selesai, diseluruh Jakarta yang terdiri dari 21 kecamatan Masyumi masih tetap unggul dengan 169.707, PNI 133.514, NU 99.656, dan PKI 79.300. Angka terakhir untuk daerah pemilihan Jakarta PNI 146.731, Masyumi 178.133, NU 122.474, dan PKI 86.345.

Kekalahan PNI di Jakarta Raya ini, disebabkan konsolidasi dari simpatisan kader PNI masih kurang solid dalam mengkampanyekan PNI sebagai partai front nasional dan juga para kader atau simpatisan partai PNI ini tidak menjalan mesin politik terhadap para pemilih anak muda (golongan anak-anak sekolah yang terpelajar). PNI lebih fokus pemenangan di wilayah luar Jakarta yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, keyakinan partai PNI yang bakal menguasai wilayah ibukota karena mayoritas penduduk di Jakarta kebanyakan bekerja sebagai birokrat atau aparatur negara seperti lurah, kepala desa, dan camat.

Kesimpulan

Masyarakat Indonesia bergerak cepat dalam mengkonsolidasi kemerdekaan pasca memproklamkan Kemerdekaan dengan menyiapkan Pemilihan Umum. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 29

September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan Majelis Konstituante (semacam DPR). Peristiwa Pemilu tahun 1955 dikenal sebagai pemilu dengan makna LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), demokratis, aman, damai, dan tanpa politik uang ditengah-tengah pertentangan ideologi politik yang sangat tajam. Namun, disayangkan Pemilu 1955 yang dianggap terbaik tersebut tidak diikuti oleh perkembangan politik nasional yang sehat dan rasional. Masyarakat terpecah dan terbelah menjadi beberapa kelompok aliran, golongan serta garis ideologi kepartaian.

Pemilu tahun 1955, menghasilkan empat partai besar dalam DPR dengan jumlah kursi masing-masing PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI 39 kursi. Kursi yang diperbutkan berjumlah total 260 kursi. Dalam Majelis Konstituante yang diperebutkan menjadi dua kali lipat yakni 520 kursi, tetapi raihan masing-masing partai besar dalam majelis tidak selalu bersifat matematis. Partai yang ketika itu dianggap paling intelektual di Indonesia adalah PSI (Partai Sosialis Indonesia). Akan tetapi partai ini menderita kekalahan telak dan hanya meraih lima kursi di DPR, sekalipun masih ada partai-partai gurem dengan satu kursi.

Keberhasilan PNI dalam mendulang suara terbanyak secara nasional dalam Pemilu 1955 ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Dapat dikatakan demikian karena, sebagai salah satu partai besar yang memiliki kedekatan politik serta ideologi dengan Presiden Soekarno. PNI sebagai partai politik jelas memiliki kompetitor yang berbeda di masing-masing kawasan di Jakarta. Persaingan dalam merebut suara rakyat di Jakarta antara PNI sebagai salah satu partai yang dominan berhadapan dengan Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga Partai Nahdlatul Ulama menarik untuk dilihat sebagai acuan distribusi kekuatan politik di Jakarta, maka hasil perolehan Pemilu 1955 di

Jakarta PNI sebagai partai politik tidak mengalami kemenangan yang signifikan, PNI kalah suara dari Masyumi, selain itu, melalui hasil Pemilu 1955 ini, dapat memperlihatkan peta politik, perilaku pemilih, partisipasi politik masyarakat di Jakarta.

Daftar Pustaka

AD/ART PNI Cabang Jakarta tahun 1955.

Alfian. 1991. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Ali Sastroamijoyo. 1974. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT Kinta.

Antara, 2 Maret 1956

Cahyo Budi Utomo. 1995. *Dinamika Pergerakan Nasional Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Feith, Herbert dan Castles, Lance. 1995. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.

Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca N.Y: Cornell University.

Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia.

G. Moedjiyanto. 1988. *Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius

Lembaran Negara UUD Pemilihan Umum, No. 7 tahun 1953

M. Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.

Nazaruddin Sjamsuddin. 1984. *PNI dan Kepoliticannya 1963-1969*. Jakarta: CV Rajawali.

Prisma, 9 September 1981

Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Sin Po, 18 April 1955

Soenario. 1972. *Banteng Segitiga*. Jakarta: Yayasan Marinda.

Suara Masyarakat, 24 Agustus 1955, 4 Oktober 1955

Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suluh Indonesia, 4 Juli 1955, 7 September 1955, 27 September 1955

Sumber Wawancara

Nama : Hardi

Usia : 82 tahun

Status : selaku anggota Partai PNI

Alamat: Jl. Lenteng agung pasar minggu Jakarta Selatan

Nama : Aziz

Usia : 77 tahun

Status : sebagai warga Jakarta

Alamat: Jalan pangadegan timur 1 nomor 15 Pancoran Jakarta Selatan